BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan kampanye hitam oleh Bawaslu Jakarta Barat melalui Instagram tidak hanya bersifat informatif, tetapi telah berkembang menjadi pendekatan komunikasi digital yang komprehensif dan strategis. Lembaga ini tidak lagi sekedar menyampaikan larangan atau peraturan secara satu arah, melainkan aktif membangun ruang dialog, partisipasi publik, serta citra institusional yang adaptif terhadap perubahan ekosistem informasi digital. Strategi ini ditunjukkan melalui tiga pilar utama: edukasi visual, pelibatan publik, dan pelaporan kelembagaan yang dikemas dalam konten media sosial. Strategi edukatif diwujudkan melalui infografis yang lugas, mudah dipahami, serta menggunakan pendekatan visual persuasive. Tujuan utama dari konten ini adalah membentuk kesadaran publik, terutama pemilih muda, tentang bahaya kampanye hitam dan pentingnya pemilu yang bersih. Di sisi lain, pendekatan partisipatif mendorong audiens untuk berperan aktif sebagai mitra pengawasan digital, melalui penyediaan kanal pelaporan, ajakan pelibatan, dan ruang diskusi dua arah seperti dalam program Instagram *Live*. Pendekatan ini menempatkan publik sebagai subjek, bukan objek, dalam proses pengawasan. Selain itu, strategi reputasional dilakukan dengan menyusun narasi visual kegiatan kelembagaan secara sistematis guna membangun legitimasi, kepercayaan, dan citra bahwa Bawaslu merupakan lembaga yang aktif, terbuka, serta responsif dalam menjalankan tugas pengawasannya. Secara keseluruhan, Bawaslu Jakarta Barat telah menunjukkan transformasi kelembagaan dalam merespons tantangan pengawasan kampanye di era digital. Strategi visual yang dilakukan bukan hanya mendukung proses pengawasan secara operasional, tetapi juga membentuk budaya politik digital baru yang lebih inklusif, deliberatif, dan kolaboratif. Namun demikian, untuk menghadirkan dampak yang lebih sistemik dan berkelanjutan, strategi ini perlu didukung oleh sistem teknologi yang lebih canggih, regulasi yang lebih progresif, dan penguatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran baik secara praktis untuk pemangku kebijakan, maupun secara akademik untuk pengembangan ilmu dan praktik pengawasan pemilu di era digital, antara lain:

a. Saran Praktis

1. Bawaslu Jakarta Barat perlu lebih aktif mendorong desentralisasi kewenangan pengawasan digital dari Bawaslu RI agar kebijakan dan respons terhadap pelanggaran kampanye hitam dapat dilakukan secara lebih cepat dan kontekstual. Selain itu, penting bagi Bawaslu di tingkat kota untuk dapat mengembangkan strategi komunikasi publik berbasis prinsip *strategic transparency*, dengan menyampaikan informasi secara terbuka, konsisten, dan terstruktur melalui kanal digital seperti Instagram. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat posisi Bawaslu sebagai aktor pengawasan yang profesional, adaptif, dan responsif dalam menghadapi tantangan disinformasi digital. Kolaborasi lintas sektor dengan komunitas teknologi, startup, dan perguruan tinggi juga perlu ditingkatkan untuk membangun sistem pemantauan konten berbasis Artificial Intelligence (AI) yang mampu bekerja secara real-time.
2. Bawaslu RI dan Pemerintah Pusat disarankan untuk melakukan reformasi regulasi dengan merevisi UU Pemilu dan PKPU, termasuk mewajibkan seluruh peserta pemilu untuk mendaftarkan akun resmi media sosial sebagai objek pengawasan. Reformasi sistem rekrutmen SDM pengawas juga penting dilakukan agar lebih berbasis profesionalisme dan meritokrasi guna meningkatkan kredibilitas dan netralitas kelembagaan.
3. Masyarakat sebagai bagian dari ekosistem demokrasi digital, diharapkan terus meningkatkan literasi digital dan turut berpartisipasi aktif dalam melaporkan serta menangkal kampanye hitam di media sosial. Peningkatan partisipasi publik harus dibarengi dengan penyediaan kanal pelaporan yang mudah diakses, responsif, dan edukatif.
4. Peningkatan kapasitas internal Bawaslu menjadi kunci agar strategi pengawasan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga dapat menimbulkan

efek jera. Hal ini mencakup pelatihan rutin tentang pemanfaatan teknologi digital, etika pengawasan, dan kemampuan dalam analisis konten berbasis data.

b. Saran Akademik

1. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengembangkan indikator kuantitatif dalam mengukur efektivitas strategi edukasi dan pengawasan digital, misalnya melalui pengukuran *engagement rate*, *reach*, serta efektivitas *reporting system*.
2. Diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji keterhubungan antara profesionalisme SDM pengawas dan tingkat keberhasilan penindakan pelanggaran kampanye digital, guna memberikan dasar ilmiah bagi reformasi kelembagaan Bawaslu secara menyeluruh.
3. Kajian mengenai integrasi teknologi baru dalam pengawasan pemilu, termasuk *predictive analytics* dan *AI-based monitoring tools*, dapat memperkaya literatur dalam bidang komunikasi politik digital dan manajemen strategi pemilu.